



**SALINAN**

## **BUPATI BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BANGKALAN  
NOMOR **18** TAHUN 2023  
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bangkalan, diperlukan Indikator Kinerja Utama sebagai tolak ukur dalam pencapaian tujuan dan strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026, yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk/Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten - Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/D);
18. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Kepala Daerah adalah Penjabat Bupati Bangkalan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bangkalan.
6. Indikator Kinerja Utama, yang selanjutnya disingkat IKU, adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
7. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

8. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
9. IKU PD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis PD.
10. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

#### Pasal 2

- (1) IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dan masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026.
- (2) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Kepala Daerah.

#### Pasal 4

Inspektorat wajib:

- a. melakukan review atas capaian kinerja setiap PD dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dan melaporkan kepada Kepala Daerah.

BAB II  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan  
pada tanggal 13 April 2023

Pt. BUPATI BANGKALAN,

ttd.

MOHNI

Diundangkan di Bangkalan  
pada tanggal 13 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,

ttd.

MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2023

NOMOR *17* SERI *E* .

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MASYHUDUNNURY  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19741115 199803 1 004

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 18  
TAHUN 2023 TENTANG INDIKATOR KINERJA  
UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024-2026.

INDIKATOR KINERJA RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024-2026

<b>TUJUAN 1</b>				
<b>URAIAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>FORMULASI PENGHITUNGAN</b>	<b>KONDISI AWAL 2022</b>	<b>KONDISI AKHIR 2026</b>
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	(1) Indeks Pembangunan Manusia	<p>Sebuah indikator kesejahteraan yang dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran. Rumus penghitungan IPM sebagai berikut.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <math display="block">❖ I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}</math> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <math display="block">❖ I_{pengetahuan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}</math> </div> <div style="margin-left: 20px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}</math></li> <li>• <math>I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}</math></li> </ul> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; background-color: #e6f2ff;"> <math display="block">❖ I_{pengeluaran} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{maks}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}</math> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> <math display="block">IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pengetahuan} \times I_{daya\ beli}}</math> </div>	65,05	66,5 - 67,2

<b>TUJUAN 1</b>				
<b>URAIAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>FORMULASI PENGHITUNGAN</b>	<b>KONDISI AWAL 2022</b>	<b>KONDISI AKHIR 2026</b>
	(2) Indeks Pembangunan Gender (IPG)	<p>Merupakan ukuran pembangunan manusia berbasis gender dilihat dari tiga dimensi capaian dasar manusia yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.</p> $IPM = \sqrt[3]{\frac{A}{3} + \frac{B}{3} + \frac{C}{3}}$ $IPM = \sqrt[3]{\frac{A}{3} + \frac{B}{3} + \frac{C}{3}}$ $IPG = \frac{IPM}{IPM}$	87,35	88,56 - 88,95
	(3) Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	<p>Survei kepada elemen masyarakat dari kecamatan hingga aparatur negara dengan mengukur sikap seseorang yang memiliki unsur kebaikan (salih) atau manfaat dalam kerangka hidup bermasyarakat, meliputi :</p> <p>Solidaritas sosial (al-takaful alijtima’)</p> <p>Toleransi (al-tasamuh)</p> <p>Mutualitas/Kerjasama (al-ta’awun)</p> <p>Tengah-tengah (al-I’tidal)</p> <p>Stabilitas (al-stabat)</p>	80,47	87,00 - 87,99

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
(1) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	(1) Angka Harapan Hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	70,54 tahun	71,89 tahun	71,00 tahun	71,33 tahun	71,50 tahun	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur, sarana prasarana, dan sistem layanan kesehatan kepada masyarakat.  Meningkatkan keberlanjutan dan pelayanan Universal Health Coverage (UHC)  Percepatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan  Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat  Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
								pencegahan dan penanganan anak kerdil (stunting) melalui pendampingan dan pendidikan kesejahteraan keluarga, fasilitasi peningkatan gizi serta perbaikan sanitasi.  Aktivasi peran kader PKK dan Dasawisma sebagai ujung tombak/ garda terdepan	Kesehatan  Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan  Minuman

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
								pemberdayaan kesejahteraan keluarga.  Pendampingan dan pelayanan kesehatan pada lembaga pendidikan informal khususnya di madrasah/ pesantren  Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan akses, layanan,	

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
								dan perbaikan sistem peningkatan kesehatan masyarakat.	

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
(2) Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Pendidikan	(1) Indeks Pendidikan;	(Indeks harapan lama sekolah + Indeks Rata-rata lama sekolah) / 2	6,4	6,1	6,8	7	7,4	<p>Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan jenjang PAUD, SD, dan SMP.</p> <p>Meningkatkan sarana prasarana pendidikan baik fisik, sistem, serta teknologi.</p> <p>Pengembangan pendidikan formal pada lembaga lembaga</p>	<p>Program Pengelolaan Pendidikan</p> <p>Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan</p>

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
								formal seperti pesantren dalam bentuk boarding school atau program kejar paket.  Pengembangan pendidikan formal pada lembaga lembaga pendidikan non formal seperti pesantren dalam bentuk boarding school atau program kejar paket.	

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
								Mengembangkan kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kapasitas pendidikan misalkan dalam bentuk Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM).	
(3) Meningkatnya budaya literasi masyarakat	(1) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan  <b>Rumus</b> $= \sum \frac{X_i}{N} \times 100$	6,4	6,1	6,8	7	7,4	Memaksimalkan fungsi perpustakaan sekolah melalui stimulasi kegiatan perlombaan	Program Pembinaan Perpustakaan

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
								literasi perpustakaan.  Mengaktivasi peran komunitas dan pegiat literasi dalam mengembangkan inisiasi dan inovasi dibidang literasi.  Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi/ digital untuk penyediaan layanan	

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
								perpustakaan/ literasi.	
(4) Meningkatkan kualitas Pembangunan Pemuda dan Prestasi Olahraga	(1) Indeks Pembangunan Pemuda	Alat ukur Pembangunan Pemuda di 5 (lima) domain dasar yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan, Lapangan dan Kesempatan Kerja dan Partisipasi dan Kepemimpinan serta Gender dan Diskriminasi.	NA	NA	44,64	47,65	50,60	Meningkatkan even produktif dan kreatif sebagai media aktualisasi prestasi, kemampuan, minat dan bakat pemuda.  Meningkatkan fasilitasi pemuda untuk mengikuti	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan  Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan  Program Pengembangan

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
								<p>even atau kompetisi di level regional, nasional, maupun internasional.</p> <p>Meningkatkan fasilitasi pemuda untuk bergerak dibidang wirausaha dan enterpreneur dan start up.</p>	Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
(1) Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui pemberdayaan	(1) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.	62,75	65,8	65	68	70	Pengembangan program wirausaha berbasis perempuan.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
perempuan dan pengendalian penduduk								Peningkatan fasilitasi peran perempuan dan atau organisasi perempuan di sektor publik  Peningkatan program preventif dan mitigasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Program Perlindungan Perempuan

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
	(2) Laju pertumbuhan penduduk	$\frac{P_t - P_0}{P_0} \times 100$ $\frac{P_{t+1} - P_t}{P_t} \times 100$ $\frac{P_{t+2} - P_{t+1}}{P_{t+1}} \times 100$ $\frac{P_{t+3} - P_{t+2}}{P_{t+2}} \times 100$ $\frac{P_{t+4} - P_{t+3}}{P_{t+3}} \times 100$	1,1	1	0,9	0,8	0,7	Meningkatkan kampanye, edukasi, dan fasilitasi pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB). Pengembangan program pemberdayaan bagi Kepala Rumah Tangga Perempuan untuk penguatan kapasitas,	Program Pengendalian Penduduk  Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)  Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
								peningkatan akses ekonomi dan kesejahteraan.	
(5) Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan kerukunan hidup bermasyarakat	(1) Persentase penurunan pelanggaran Trantibum dan Perda /Perkada	(Pelanggaran Tahun berkenaan - Pelanggaran Tahun n-1)/Pelanggaran Tahun n-1	2.17%	NA	2.22%	2.27%	2.32%	Optimalisasi Edukasi dan Pencegahan Konflik Berbasis Masyarakat.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
	(2) Rata-rata Persentase Pencegahan dan Penanganan Konflik SARA/politik /bela Negara	(Jumlah kasus SARA/politik/bela Negara yang terselesaikan / Jumlah kasus yang dilaporkan) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	2) Penguatan nilai religi, seni dan budaya lokal sebagai spirit penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan modal sosial dalam kehidupan kemasyarakatan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan  Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya  Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
									Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik  Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan  Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
									Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

TUJUAN 2				
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PENGHITUNGAN	KONDISI AWAL 2022	KONDISI AKHIR 2026
Menurunkan angka kemiskinan	(1) Tingkat kemiskinan	Persentase masyarakat miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah	19,44%	16,73 - 15,24%
	(2) Indeks Desa Membangun	Terdiri dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi.	0,6879	0,7254 - 0,7404

		IDM = (Indeks Ketahanan Sosial + Indeks Ketahanan Ekonomi + Indeks Ketahanan Lingkungan) / 3		
	(3) Tingkat pengangguran Terbuka	(Jumlah pengangguran) / (Jumlah Angkatan Kerja) x 100%	8,05%	5,65% - 5,60

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
(1) Meningkatnya PPKS yang tertangani	(1) Persentase PPKS yang ditangani	(Jumlah PPKS yang ditangani / Jumlah PPKS yang dilaporkan) x 100%	6,22%	4,75%	6,22%	7,69%	9,16%	Aktivasi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk meningkatkan kualitas pemutakhiran database kemiskinan serta meningkatkan efektivitas ketepatan	Program Pemberdayaan Sosial Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
								sasaran implementasi program/ bantuan/ stimulan dalam rangka penurunan kemiskinan.  Meningkatkan sinkronisasi program penurunan kemiskinan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah	

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
								kabupaten, serta pemerintah desa.  Meningkatkan efektivitas program penurunan kemiskinan berdasarkan kondisi riil indikator kemiskinan dengan dukungan pendampingan.  Peningkatan Layanan Perlindungan dan	

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
			AWAL 2022						
								Jaminan Sosial yang Tepat Sasaran kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) berdasarkan pemutakhiran data yang lengkap dan akurat.  Peningkatan kolaborasi pentahelix antar organisasi perangkat daerah dan atau dengan	

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
								berbagai elemen seperti civil society, swasta, perguruan tinggi dalam menurunkan angka kemiskinan	
(2) Meningkatnya Status Kemandirian Desa	(1) Persentase Desa yang Meningkat Statusnya	(Jumlah Desa yang Meningkat Statusnya / Jumlah desa) x 100%	20,15	21,98	24,18	26,37	29,3	Mendorong dan meningkatkan fasilitasi program pemberdayaan masyarakat di pedesaan.  Meningkatkan infrastruktur jalan, saluran irigasi, air bersih,	Program Peningkatan Kerjasama Desa  Program Administrasi Pemerintahan Desa  Program Pemberdayaan

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
								serta fasilitas umum yang berdampak langsung bagi masyarakat dan status Indeks Desa Membangun (IDM).  Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan desa serta pelayanan masyarakat.	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
(1) Menurunnya pengangguran	(1) Persentase Penurunan Jumlah Pengangguran	(Jumlah Pengangguran Tahun berkenaan - Pelanggaran Tahun n-1)/Pelanggaran Tahun n-1 x 100%	2,98%	3,48%	3,98%	4,48%	4,98%	Meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja .  Meningkatkan layanan dan akses bursa kerja secara offline maupun online  Meningkatkan jumlah wirausaha kreatif dan atau start up melalui program inkubasi.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja  Program Penempatan Tenaga Kerja  Program Hubungan Industrial

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
								Mengembangkan Bangkalan Creativ Space (BCS) yang terintegrasi dengan co working space, inkubasi, dan ruang pameran / fasilitas pemasaran.	

<b>TUJUAN 3</b>				
<b>URAIAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>FORMULASI PENGHITUNGAN</b>	<b>KONDISI AWAL 2022</b>	<b>KONDISI AKHIR 2026</b>
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif yang didukung oleh peningkatan infrastruktur berwawasan lingkungan	(1) Pertumbuhan ekonomi	(PDRB tahun ini - PDRB tahun lalu) / PDRB tahun lalu x 100%	-1,12%	3,95% - 5,65%
	(2) Gini Rasio	Alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Dengan rumus sebagai berikut : $GR = 1 - \sum_{i=1}^n P_i (F_i + F_{i-1})$	0,306	0,27 - 0,26
	(3) Rata-rata kualitas infrastruktur	(Persentase infrastruktur dasar ke-PU-an dalam kondisi baik/terlayani + Persentase infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik + Persentase infrastruktur dasar perumahan dan permukiman dalam kondisi baik) / 3	59,18%	64,80% - 65,75%
	(4) Indeks Resiko Bencana	Berdasarkan pada penilaian bahaya, kerentanan dan kapasitas di wilayah berkenaan dengan rumus: <b>Risk (R) = H xV/ C</b>  Keterangan => R : Resiko Bencana H : Bahaya V : Kerentanan C : Kapasitas	102,00	95,9 - 94,00

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
(1) Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertanian dalam arti luas	(1) Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan)	(Produksi tahun ini – produksi tahun lalu)/luas panen	0,40	NA	0,40	0,52	0,6	Peningkatan produktivitas dan Daya Saing usaha komoditas strategis Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan kehutanan.  Meningkatkan infrastruktur pendukung pertanian  Meningkatkan penumbuhan wirausaha muda	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian  Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian  Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian  Program Penyuluhan

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
								pertanian.  Peningkatan nilai tambah pertanian melalui agroindustri dan agrobisnis.  Pengembangan pertanian berbasis kawasan agropolitan dan minapolitan.	Pertanian
	(2) Peningkatan Produktivitas Sektor Peternakan	Faktor - faktor yang mempengaruhi produktivitas yaitu, konsumsi ransum, pertumbuhan atau penambahan bobot	0,93	NA	1,00%	1,02%	1,03%		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
	(Besar, Kecil, dan Unggas)	badan, dan konversi ransum							Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian  Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner  Program Perizinan Usaha Pertanian  Program Penyuluhan Pertanian

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
	(3) Peningkatan Produktivitas Sektor Perikanan	$\frac{1 \text{ Produksi (kg)} \times 1 \text{ hari per trip}}{1 \text{ Penanaman dan Pengukuran (Rp) trip} \times 1 \text{ hari per trip}}$	5,21	5,94	5,10	5,11	5,12		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap  Program Pengelolaan Perikanan Budidaya  Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
(2) Meningkatnya realisasi investasi daerah	(1) Pertumbuhan Nilai Investasi daerah	$\frac{((\text{Nilai investasi daerah (th.n)} - \text{Nilai investasi daerah (th.n-1)}) / \text{Nilai investasi daerah (th.n-1)}) \times 100\%}{100\%}$	391,99%	4,41%	5,00%	5,50%	6,00%	Peningkatan pelayanan pada bidang investasi dan	Program Promosi Penanaman Modal  Program Pelayanan Penanaman Modal

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
								perizinan secara mudah, transparan, dan akuntabel.  Meningkatkan promosi potensi investasi daerah.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
(3) Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan	(1) Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha	(Jumlah pelaku usaha tahun ini – Jumlah pelaku usaha tahun lalu) / Jumlah pelaku usaha tahun lalu x 100%	1,00	1,02	1,03	1,04	1,06	Meningkatkan kawasan infrastruktur pusat perdagangan.  Mengembangkan promosi dan ekosistem perdagangan melalui misi dagang daerah.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan  Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
									Program Pengembangan Ekspor  Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
(4) Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri Pengolahan	(1) Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	$((\text{PDRB sektor industri (th.n)} - \text{PDRB sektor industri (th.n-1)}) / \text{PDRB sektor industri (th.n-1)}) \times 100\%$	9,86	NA	1,65	1,8	2,00	Penguatan Daya Saing dan Peningkatan produktivitas industri pengolahan agro dan non agro	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri  Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
								Meningkatkan fasilitas teknologi dan mesin peralatan industri pengolahan	
(5) Terwujudnya pelestarian seni dan budaya lokal untuk mendukung pembangunan pariwisata	(1) Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	(Jumlah kunjungan wisatawan tahun ini – Jumlah kunjungan wisatawan tahun lalu) / Jumlah kunjungan wisatawan tahun lalu x 100%	1267,08	13,88	14,92	15,35	16,68	Mengembangkan potensi Kawasan religi serta seni dan budaya sebagai obyek daya tarik wisata (ODTW)  Meningkatkan interkoneksi antar kawasan dan lokasi wisata	Program Pengembangan Kebudayaan  Program Pengelolaan Permuseuman  Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata  Program

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
								<p>Mengembangkan jejaring pelaku dan pengelola wisata dilingkup kabupaten, swasta, lembaga, serta pemerintah desa/ Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)</p> <p>Peningkatan layanan promosi dan informasi pariwisata.</p> <p>Mengintegrasikan sumberdaya wisata dengan</p>	<p>Pemasaran Pariwisata</p> <p>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif</p>

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
								potensi ekonomi kreatif.	
(1) Meningkatnya produktivitas usaha ekonomi rakyat	(1) Pertumbuhan omset Usaha Mikro dan Koperasi	(Jumlah omset tahun ini – Jumlah omset tahun lalu) / Jumlah omset tahun lalu x 100%	4.63	0,07	0,1	0,03	0,16	Menumbuhkan kembangkan kewirausahaan Koperasi  Menumbuhkan kembangkan kewirausahaan Usaha Mikro.  Memfasilitasi layanan inkubasi bisnis, co working space, dan start up	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam  Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi  Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi  Program Pendidikan Dan

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
									Latihan Perkoperasian  Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi  Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)  Program Pengembangan UMKM

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
(2) Meningkatnya ketahanan pangan daerah	(1) Indeks Ketahanan Pangan	$Y(j) = \sum_{i=1}^9 a_i X_{ij}$ <p>Dimana:                      i : Indikator ke-1, 2, 3, ... 7, 8, dan 9                      j : Kabupaten ke-1, 2, 3, ... 414, 415, dan 416; kota ke-1, 2, 3, ... 96, 97, dan 98                      Yj : Indeks Ketahanan Pangan kabupaten/kota ke-j                      ai : Bobot masing-masing indikator ke-i                      Xij : Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-i pada kabupaten/kota ke-j</p>	70,59	74,25	75	79	83	Pengembangan sumber pangan alternatif berbasis potensi local  Mengembangkan sistem rumah pangan lestari dan pemanfaatan pekarangan sebagai penyanggakebutuhan pangan keluarga.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan  Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat  Program Penanganan Kerawanan Pangan

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
(1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dan permukiman	(1) Persentase infrastruktur dasar ke-PU-an dalam kondisi baik	$\frac{\sum \text{infrastruktur dasar ke-PU-an dalam kondisi baik}}{\sum \text{seluruh infrastruktur}} \times 100\%$	63,35%	63,75 %	64,00 %	64,25 %	64,75 %	Mengembangkan tata kota yang cerdas, inspiratif, nyaman, aman dan berkeadilan  Mengembangkan infrastruktur berbasis Kawasan  Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan dan Jembatan  Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang  Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)  Program Pengembangan Jasa Kontruksi  Program Penyelenggaraan Jalan

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
								prasarana daerah aliran sungai (DAS) dan jaringan drainase  eningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana transportasi  Meningkatkan kuantitas dan kualitas Infrastruktur perumahan dan Permukiman	

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
								Meningkatkan Sistem Penyediaan Air Bersih Dan Air Minum (SPAM)	
	(2) Persentase infrastruktur dasar perumahan dan permukiman dalam kondisi baik	$\sum$ infrastruktur dasar perumahan dan permukiman dalam kondisi baik / $\sum$ seluruh infrastruktur x 100%	36,18%	39,84 %	39,84 %	41,49 %	43,34 %		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum  Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah  Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
									Program Penataan Bangunan Gedung  Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya  Program Kawasan Permukiman  Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)  Program Perumahan dan

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
									Kawasan Permukiman Kumuh  Program Pengembangan Perumahan
	(3) Persentase Infrastruktur Perhubungan yang berfungsi dengan baik	Persentase infrastruktur perhubungan yang berfungsi dengan baik	78,00%	80,00 %	83.43 %	86.53 %	88,07 %		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
(2) Terjaganya Kualitas Lingkungan	(4) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$(IPAx30\%) + (IPUx30\%) + (ITHx40\%)$	56,84	55,44	56,90 56,92	56,93 56,95	56,96 57,00	Meningkatkan pengendalian pembangunan dan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup  Program Pengendalian

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
								Mengembangkan program pengelolaan persampahan  Meningkatkan kualitas sumberdaya lingkungan melalui pelayanan tata lingkungan dan pengelolaan sumber- sumber polusi lingkungan	Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup  Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)  Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
									Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)  Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup  Program Pengelolaan Persampahan

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
(1) Optimalnya penanganan bencana	(1) Indeks Ketahanan Daerah	$\frac{\text{jumlah rumah aman}}{\text{jumlah rumah}} \times 100$	0,58**	NA	0,59 - 0,60	0,61- 0,62	0,63 - 0,64	Meningkatkan infrastruktur pencegahan dan penanggulangan bencana.  Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang upaya preventif dan mitigasi terhadap bencana	Program Penanggulangan Bencana  Program Penanganan Bencana

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
								Meningkatkan kapasitas dan kesiapan Taganadalam upaya preventif dan mitigasi bencana	

<b>TUJUAN 4</b>																																																																																																																																																													
<b>URAIAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>FORMULASI PENGHITUNGAN</b>	<b>KONDISI AWAL 2022</b>	<b>KONDISI AKHIR 2026</b>																																																																																																																																																									
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	(1) Indeks Reformasi Birokrasi	<p>Merupakan akumulasi dari beberapa Komponen Penilaian Pengungkit ditambah Penilaian Hasil dengan rincian Komponen sebagai berikut :</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 5%;">No :</th> <th style="text-align: left; width: 60%;">Komponen Penilaian</th> <th style="text-align: right; width: 35%;">Nilai max :</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Manajemen Pelayanan</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kebijakan</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pelayanan Tata Kelola</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kebijakan</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>33</td> <td>Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>34</td> <td>Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>36</td> <td>Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>37</td> <td>Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>38</td> <td>Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>39</td> <td>Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>41</td> <td>Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>42</td> <td>Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>43</td> <td>Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>44</td> <td>Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>45</td> <td>Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>46</td> <td>Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>47</td> <td>Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>48</td> <td>Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>49</td> <td>Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> </tbody> </table>	No :	Komponen Penilaian	Nilai max :	1	Manajemen Pelayanan	1	2	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kebijakan	1	3	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1	4	Pelayanan Tata Kelola	1	5	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kebijakan	1	6	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1	7	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1	8	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1	9	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1	10	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1	11	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1	12	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1	13	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1	14	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1	15	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1	16	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1	17	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1	18	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1	19	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1	20	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1	21	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1	22	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1	23	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1	24	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1	25	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1	26	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1	27	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1	28	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1	29	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1	30	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1	31	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1	32	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1	33	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1	34	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1	35	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1	36	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1	37	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1	38	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1	39	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1	40	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1	41	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1	42	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1	43	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1	44	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1	45	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1	46	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1	47	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1	48	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1	49	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1	50	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1	53,74	59,20 - 61,00
No :	Komponen Penilaian	Nilai max :																																																																																																																																																											
1	Manajemen Pelayanan	1																																																																																																																																																											
2	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kebijakan	1																																																																																																																																																											
3	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1																																																																																																																																																											
4	Pelayanan Tata Kelola	1																																																																																																																																																											
5	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kebijakan	1																																																																																																																																																											
6	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1																																																																																																																																																											
7	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1																																																																																																																																																											
8	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1																																																																																																																																																											
9	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1																																																																																																																																																											
10	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1																																																																																																																																																											
11	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1																																																																																																																																																											
12	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1																																																																																																																																																											
13	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1																																																																																																																																																											
14	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1																																																																																																																																																											
15	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1																																																																																																																																																											
16	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1																																																																																																																																																											
17	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1																																																																																																																																																											
18	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1																																																																																																																																																											
19	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1																																																																																																																																																											
20	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1																																																																																																																																																											
21	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1																																																																																																																																																											
22	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1																																																																																																																																																											
23	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1																																																																																																																																																											
24	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1																																																																																																																																																											
25	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1																																																																																																																																																											
26	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1																																																																																																																																																											
27	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1																																																																																																																																																											
28	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1																																																																																																																																																											
29	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1																																																																																																																																																											
30	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1																																																																																																																																																											
31	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1																																																																																																																																																											
32	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1																																																																																																																																																											
33	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1																																																																																																																																																											
34	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1																																																																																																																																																											
35	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1																																																																																																																																																											
36	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1																																																																																																																																																											
37	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1																																																																																																																																																											
38	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1																																																																																																																																																											
39	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1																																																																																																																																																											
40	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1																																																																																																																																																											
41	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1																																																																																																																																																											
42	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1																																																																																																																																																											
43	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1																																																																																																																																																											
44	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1																																																																																																																																																											
45	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1																																																																																																																																																											
46	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1																																																																																																																																																											
47	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1																																																																																																																																																											
48	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1																																																																																																																																																											
49	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1																																																																																																																																																											
50	Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan	1																																																																																																																																																											

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN																													
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM																												
(1) Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah melalui inovasi, perencanaan berkualitas dan pelayanan publik	(1) Nilai SAKIP	Nilai Kumulatif dari beberapa komponen penilaian sebagai berikut : <table border="1" data-bbox="667 662 1101 1190"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Dimensi</th> <th>Bobot</th> <th>Sub Dimensi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan (Intern)</td> <td>10%</td> <td>                             a. Rencana Strategis (1%) meliputi Pemenuhan Rencana (1) Visi dan Rencana (5) dan Implementasi Rencana (4)                              b. Perencanaan (Intern) Tahunan (10%) meliputi Pemenuhan RMT (4) dan RMT (10%) dan Implementasi RMT (5)                         </td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengukuran (Intern)</td> <td>10%</td> <td>                             a. Pemenuhan pengumpulan (5)                              b. Kualitas Pengukuran (5) (5)                              c. Implementasi pengumpulan (5)                         </td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelaporan (Intern)</td> <td>10%</td> <td>                             a. Pemenuhan pengantar (5)                              b. Kualitas pengantar (5)                              c. Pemenuhan pengantar (5)                         </td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Etika &amp; Integritas</td> <td>10%</td> <td>                             a. Pemenuhan etika (5)                              b. Kualitas etika (5)                              c. Pemenuhan etika (5)                         </td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Kepercayaan (Intern)</td> <td>10%</td> <td>                             a. Indeks yang diinputkan (input) (5)                              b. Indeks yang diinputkan outcome (5)                              c. Indeks yang diinputkan rework (5)                         </td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Dimensi	Bobot	Sub Dimensi	1	Perencanaan (Intern)	10%	a. Rencana Strategis (1%) meliputi Pemenuhan Rencana (1) Visi dan Rencana (5) dan Implementasi Rencana (4) b. Perencanaan (Intern) Tahunan (10%) meliputi Pemenuhan RMT (4) dan RMT (10%) dan Implementasi RMT (5)	2	Pengukuran (Intern)	10%	a. Pemenuhan pengumpulan (5) b. Kualitas Pengukuran (5) (5) c. Implementasi pengumpulan (5)	3	Pelaporan (Intern)	10%	a. Pemenuhan pengantar (5) b. Kualitas pengantar (5) c. Pemenuhan pengantar (5)	4	Etika & Integritas	10%	a. Pemenuhan etika (5) b. Kualitas etika (5) c. Pemenuhan etika (5)	5	Kepercayaan (Intern)	10%	a. Indeks yang diinputkan (input) (5) b. Indeks yang diinputkan outcome (5) c. Indeks yang diinputkan rework (5)		Total	100%		(B) 63,01	(BB) 70.23	(BB) 70.23	(BB) 71.23	(BB) 72.25	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset daerah  2. Meningkatkan layanan masukan (input), umpan balik, dan keterbukaan informasi publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (51 Perangkat Daerah)  Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
No	Dimensi	Bobot	Sub Dimensi																																		
1	Perencanaan (Intern)	10%	a. Rencana Strategis (1%) meliputi Pemenuhan Rencana (1) Visi dan Rencana (5) dan Implementasi Rencana (4) b. Perencanaan (Intern) Tahunan (10%) meliputi Pemenuhan RMT (4) dan RMT (10%) dan Implementasi RMT (5)																																		
2	Pengukuran (Intern)	10%	a. Pemenuhan pengumpulan (5) b. Kualitas Pengukuran (5) (5) c. Implementasi pengumpulan (5)																																		
3	Pelaporan (Intern)	10%	a. Pemenuhan pengantar (5) b. Kualitas pengantar (5) c. Pemenuhan pengantar (5)																																		
4	Etika & Integritas	10%	a. Pemenuhan etika (5) b. Kualitas etika (5) c. Pemenuhan etika (5)																																		
5	Kepercayaan (Intern)	10%	a. Indeks yang diinputkan (input) (5) b. Indeks yang diinputkan outcome (5) c. Indeks yang diinputkan rework (5)																																		
	Total	100%																																			

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
								3. Meningkatkan pengelolaan dan administrasi asset daerah	Program Perekonomian Dan Pembangunan  Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD  Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik (18 Kecamatan)

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
									Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan (18 Kecamatan)  Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum (18 Kecamatan)

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
									Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (18 Kecamatan)

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
	(2) Status Kinerja LPPD;	Hasil Penilaian Kinerja pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Sangat Tinggi (ST)*	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Sekretariat Daerah)
	(3) Opini BPK terhadap LKPD	Hasil Audit BPK (WTP,WDP, Disclaimer)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		Program Pengelolaan Keuangan Daerah  Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
	(4) Level Maturitas SPIP	Tingkat Maturitas SPIP (Belum Tingkat Maturitas SPIP (Belum dinilai (0) / level 1/ level 2 / level 3) berdasarkan laporan hasil Quality Assurance (QA) Yang dikeluarkan oleh BPKP.	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3		Program Penyelenggaraan Pengawasan  Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
	(5) Indeks Kualitas Perencanaan	Hasil perhitungan terhadap perencanaan daerah dari segi proses, isi, hingga hasil, dengan rumus : IKP = (Penilaian Proses x 26) + (Penilaian Proses x 32,70) + (Penilaian Hasil x 41,30)	83,36%	NA	85%	87%	89%		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
									Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	(6) Indeks Inovasi Daerah	Hasil penilaian terhadap himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	52,68	53,00	54,00	55,00	56,00		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
	(7) Kualitas Pengelolaan Arsip	Persentase PD yg sudah dilakukan tata kelola arsip sesuai standart / Jumlah Keseluruhan PD x 100 %	30%	40%	50%	55%	60%		Program Pengelolaan Arsip

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
	(8) Rata-rata Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	Rata-rata dari penduduk dengan dokumen kependudukan (KTP,KAI, Bayi lahir memiliki akte) / Jumlah Penduduk (Penduduk diatas 17Tahun, Dibawah 17 Tahun, Bayi baru lahir) x 100	88,60%	90,00 %	91,50 %	92,00 %	92,50 %		Program Pendaftaran Penduduk  Program Pencatatan Sipil

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
	(9) Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Hasil perhitungan terhadap survei yang dilakukan terhadap sampel masyarakat yang mendapatkan pelayanan publik, dengan komponen penilaian : 1. Kemudahan persyaratan; 2. Prosedur; 3. Waktu; 4. Biaya; 5. Produk; 6. Kompetensi; 7. Sarana dan prasarana; dan 8. Pengaduan dan Saran	82,78	84,32	84,45	84,55	84,65		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (51 Perangkat Daerah)  Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat  Program Perekonomian Dan Pembangunan

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
									Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD  Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik (18 Kecamatan)  Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan (18 Kecamatan)

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
									Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum (18 Kecamatan)  Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (18 Kecamatan)

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
(2) Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Bangkalan	(1) Indeks Profesionalitas ASN	<p>Jumlah total hasil perkalian dari b dikalikan nilai masing-masing jaw</p> $IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ <hr/> $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$	55,03	60	62	64	66	<p>1. Mengembangkan dan mengimplementasikan road map reformasi birokrasi dan pelayanan publik</p> <p>2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas upaya peningkatan kompetensi sumber daya ASN dalam menjalankan tugasnya</p>	<p>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>Program Kepegawaian Daerah</p>

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
(3) Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi	(1) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain, meliputi Penyediaan Pusat Data Terpadu, Jaringan Intra Pemerintah, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Aplikasi Layanan SPBE serta Keamanan Informasi Pemerintah.	1,89	2,00 - 2,20	2,20 - 2,35	2,35 - 2,55	2,55 - 2,75	Mempercepat pemanfaatan ICT dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan (e-gov)	Program Informasi Dan Komunikasi Publik Program Aplikasi Informatika Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
(4) Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	(1) Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	$(\text{Pendapatan Asli Daerah} / \text{Total Pendapatan Daerah}) \times 100\%$	12,7%	13,3%	14,4%	15,5%	16,7%	1. Meningkatkan dan memperluas sumber pendapatan asli daerah (PAD) dari optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam, pajak daerah, dan retribusi daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM
								2. Meningkatkan produktivitas, efektivitas dan efisiensi Kinerja Usaha BUMD untuk mendorong peran dalam pengembangan perekonomian daerah dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah	

Plt. BUPATI BANGKALAN,

ttd.

MOHNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MASYHUDUNNURY  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19741115 199803 1 004